

Teori Hubungan Internasional

(PERSPEKTIF-PERSPEKTIF KLASIK)

Edisi Revisi

Teori dihadirkan untuk membantu menjelaskan sejumlah gejala empiris yang kompleks. Untuk keperluan itulah buku ini hadir. Hubungan antarnegara dengan berbagai dinamikanya bukanlah sesuatu yang berada jauh di sana, melainkan ia adalah keseharian kita dan tentang kita. Kompleksitas dinamika hubungan antarnegara memang menghadirkan banyak persoalan yang tidak mudah untuk dipahami dan dijelaskan.

Kehadiran buku **Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik** mencoba memberi jawaban atas sejumlah isu hubungan internasional dengan menggunakan perspektif klasik. Banyaknya teori alternatif baru yang muncul, tidak mengusangkan yang klasik. Buku ini juga bermaksud mengisi ruang yang belum banyak terisi oleh tulisan berbahasa Indonesia. Ditujukan untuk para pemula, buku ini disajikan dengan bahasa yang lugas dan alur berpikir yang mudah diikuti, sehingga mudah dipahami oleh siapa pun yang tertarik mendalami kajian Hubungan Internasional.



Airlangga University Press

Kampus C Universitas Airlangga
Mulyorejo, Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247
Fax. (031) 5992248
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

ISBN 978-602-473-013-0



9 786024 730130

Teori Hubungan Internasional

(PERSPEKTIF-PERSPEKTIF KLASIK)

Edisi Revisi

EDITOR
VINSENSIO DUGIS

Penelitian dan kerja sama Airlangga University Press dengan PIPS Unair

Teori Hubungan Internasional

(PERSPEKTIF-PERSPEKTIF KLASIK)
Edisi Revisi



Alfabeta University Press
Jalan Terusan, Gedung Paksi, Bandung 40132

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Teori Hubungan Internasional

(PERSPEKTIF-PERSPEKTIF KLASIK)

Edisi Revisi

EDITOR

VINSENSIO DUGIS



Airlangga University Press
Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR

Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik)/Editor: Vinsensio Dugis. -- Edisi Revisi -- Surabaya: Airlangga University Press, 2018. vii, 184 hlm. ; 23 cm

ISBN 978-602-473-013-0

1. Hubungan Internasional. I. Judul.

327.101

Penerbit

AIRLANGGA UNIVERSITY PRESS

No. IKAPI: 001/JTI/95

No. APPTI: 001/KTA/APPTI/X/2012

AUP 752.1/05.18 (0.03)

Cover: Erie; Layout: Bagus

Bekerjasama dengan

Pusat Inovasi Pembelajaran dan Sertifikasi (PIPS) UNAIR
Kampus C Unair, Gedung Kahuripan Lt. 2, Ruang 203, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 59204244 Fax. (031) 5920532 E-mail: adm@pips.unair.ac.id

Dicetak oleh:

Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP)
(RK 219/05.18/AUP-A3E)

Cetakan pertama — 2018

Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Prakata

Sebagaimana ditulis pada kata pengantar untuk edisi awal, buku ini ditulis sebagai respons atas tantangan yang sudah bertahun-tahun dihadapi para penulis, terutama editor, ketika mengajar mata kuliah Teori Hubungan Internasional (THI). Keterbatasan sumber bacaan yang memudahkan bagi para mahasiswa tahun pertama yang mengikuti mata kuliah THI menjadi alasan utama penulisan buku ini. Tujuannya, mempermudah para mahasiswa mengenal teori-teori dalam disiplin Hubungan Internasional (HI) sebelum mereka mengeksplorasi kajian teori pada level yang tinggi melalui sumber-sumber bacaan yang lebih luas. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan dapat membangun fondasi pemahaman dasar THI dengan lebih mudah.

Setelah mendapat berbagai masukan terhadap edisi sebelumnya, edisi revisi ini disusun kembali dengan memperbaiki kekeliruan-kekeliruan teknis yang sebelumnya ada. Di samping itu, dengan memperhatikan berbagai masukan dari kolega sejawat, edisi revisi ini juga memasukkan dua bab tambahan, yaitu bab yang membahas Neomarxisme dan bab yang menyajikan tentang English School, di mana keduanya dianggap bagian penting yang perlu dimasukkan sebagai bagian dari perspektif-perspektif klasik.

Para kontributor buku ini telah berupaya menyajikan masing-masing teori klasik hubungan internasional dengan gaya penulisan yang seringnya mungkin bagi mahasiswa hubungan internasional pada tingkat awal —bahkan mungkin juga untuk kalangan umum non-hubungan internasional yang berminat mengenal THI— sehingga dapat dengan lebih mudah mengenal dan memahami teori-teori yang tersedia. Buku ini lebih ditujukan sebagai buku pengantar. Harapannya ialah, setelah membaca buku ini para mahasiswa dapat dengan lebih mudah

mencerna sumber-sumber rujukan lainnya terkait dengan perspektif yang hendak dipahami.

Buku ini menyajikan perspektif-perspektif klasik dalam THI, diawali dengan uraian pengantar mengenai apa itu teori, bagaimana kedudukan teori dalam hubungan internasional, serta apa saja tujuan perlunya pemahaman teori dalam kajian HI. Selain perspektif-perspektif klasik, masih ada juga teori-teori alternatif dalam HI, yang tentu akan lebih baik dan lengkap jika teori-teori alternatif ini dalam kesempatan lain diterbitkan juga dalam satu buku tersendiri.

Buku ini ditulis sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas sumber daya yang ada di Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga. Untuk itu editor dan semua kontributor dalam buku ini mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terrealisasinya penerbitan buku ini. Secara khusus, ucapan terima kasih kami haturkan kepada Direktur Airlangga University Press beserta jajarannya yang telah memfasilitasi proses penerbitan buku ini. Adapun kekurangan yang masih dapat ditemukan dalam buku ini, tentu saja sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing kontributor dan editor.

Surabaya, Februari 2018

Daftar Isi

Prakata	v
Bab 1 Teori & Teori Hubungan Internasional	
Vinsensio Dugis.....	1
Bab 2 Liberalisme	
Vinsensio Dugis.....	29
Bab 3 Realisme	
I Basis Susilo.....	49
Bab 4 Marxisme	
Baiq Wardhani.....	65
Bab 5 Neoliberalisme	
Vinsensio Dugis.....	83
Bab 6 Neorealisme	
Radityo Dharmaputra.....	97
Bab 7 Neomarxisme	
Agastya Wardhana.....	117
Bab 8 English School	
I Gede Wahyu Wicaksana.....	133
Bab 9 Konstruktivisme	
I Gede Wahyu Wicaksana.....	157
Bab 10 Satu Dunia-Banyak Teori	
Vinsensio Dugis.....	179

Kontributor

PENGANTAR

English School (ES) adalah sebuah perspektif teori Hubungan Internasional (HI) yang fokus pada ide mengenai masyarakat internasional (*international society*). Disebut ES karena gagasan teoritis yang diketengahkan bersumber dari, atau banyak dipengaruhi oleh, para sarjana dan pemikir politik Inggris. Sehingga ada pula yang menyebut ES sebagai *The British Political/International Relations Theory*. Bab ini bertujuan untuk menjelajahi pemikiran ES, dengan cara melihat latar belakang perkembangan intelektual, kontribusi penting, serta metode riset ES yang relevan untuk mempelajari fenomena global kontemporer.

ES dalam Studi HI

Dalam evolusi paradigma HI, ES muncul bersamaan dengan neorealisme dan neoliberalisme pada dekade 1960-an dan 1970-an. Pada masa awal, ES diperkenalkan oleh teoritis HI yang berafiliasi dengan Universitas Oxford dan London School of Economics, yakni Hedley Bull, Adam Watson, Martin Wight, dan R. J. Vincent. Memasuki dasawarsa 1970-an, ES mulai berkembang sebagai perspektif teori alternatif yang populer di universitas-universitas Eropa. Namun baru setelah Perang Dingin berakhir, ES mendapat perhatian luas dari akademisi HI di luar Eropa, khususnya di negara-negara anggota Persemakmuran

(*commonwealth*) (Suganami, 2006: Bab 1–2). Oleh karena itu, ekspansi ES diklaim sebagai ekstensi kecendekiaan politik Inggris (Linklater, 2013:84).

Para pengkaji HI saling berbeda pandangan dalam memaknai posisi ES baik terkait dengan fase evolusi maupun kualitas substansi dan kontribusi ES terhadap teori HI. Secara ringkas polemik menyoal ES bisa dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, anggapan bahwa ES adalah koleksi teori politik internasional orisinal yang relevan bagi studi HI terutama dengan pendekatan historis. Harry Buzan (2001:472) berpendapat ES menawarkan sudut pandang unik tentang politik antarbangsa (*worldview*) yang berorientasi kepada pluralisme metodologi dan interpretasi. Dua aspek inilah yang menurut Buzan tidak diperhatikan oleh para neorealis dan neoliberalis. Oleh sebab itu, ES signifikan sebagai opsi teoritis dan metodis yang layak dibandingkan dengan perspektif utama, seperti realisme dan liberalisme.

Kedua, bertolak belakang dengan penilaian Buzan, Jones (1981) dan Hall (2001) justru menganggap ES tidak pernah ada, dan hanya sekadar pewacanaan ulang atas konsep dan metodologi mapan milik realisme neoklasik. Karena itu, mereka menyarankan agar ES 'ditutup saja'. Pendapat senada dikemukakan oleh Dunne (1998) yang menyatakan ES tidak cukup meyakinkan sebagai sebuah perspektif mandiri, sebab fondasi teori ES jelas-jelas menyerupai solidarisme dan konstruktivisme. ES dianggap lebih cocok disebut sebagai preskripsi kebijakan internasional berorientasi realis. Misalkan ES memuat konsep-konsep realis termasuk supremasi negara berdaulat, anarki, dan skeptisisme terhadap kemungkinan pencapaian konsensus di antara sistem politik yang berbeda. Para pengkritik kemudian menyamakan ES dengan *British realism*.

Kritik Jones dan Hall memang bukan tanpa alasan. Bila dicermati kembali karya-karya para perintis ES, tidak ditemukan satu identifikasi eksplisit tentang kehadiran sebuah paradigma teori bernama ES dengan maksud untuk memberikan pilihan selain realisme dan liberalism. Fokus kajian mereka pun tidak secara langsung berhubungan dengan usaha intelektual berkarakter filosofis maupun teoritis tertentu. Bahkan ada kesan lebih berorientasi penyelesaian masalah (*problem solving*). Bull (2002) mencurahkan perhatian kepada pencarian dan penjelasan mengenai eksistensi tatanan (*order*) yang berevolusi di tengah masyarakat anarkis. Wight (1991) sangat intens membahas dialektika tiga tradisi

politik internasional; Hobbesian, Lockean, dan Kantian. Sementara Watson (1984) dan Vincent (1986) mengkhususkan diri pada studi relasi antara hukum internasional dan diplomasi melalui telaah sejarah sistem internasional.

Usaha yang lebih 'terorganisir' untuk mengelompokkan berbagai gagasan teoritis menjadi ES justru dilakukan bukan oleh para pionir ES yang tergerak merespons kritik ataupun karena keinginan memperoleh pengakuan akademik, melainkan datang dari inisiatif sarjana HI yang sebelumnya tidak punya koneksi intelektual dengan ES, semisal mereka yang sebelumnya bekerja dalam mazhab realisme, liberalisme, dan konstruktivisme (Buzan, 2014:5–6). Dua faktor memungkinkan proses identifikasi ES bisa berlangsung (Waever, 1996:149–150); Kegagalan para realis dan liberalis untuk memprediksi akhir Perang Dingin dan kemunculan orde politik internasional diwarnai oleh ketidakpastian (*uncertainty*); Pesimisme yang semakin besar terhadap validitas kebijakan keamanan internasional yang menekankan pada peran kekuatan dan identitas nasional, sehingga mengesampingkan aspek-aspek sosial yang juga berpengaruh terhadap interaksi antar individu pada level mikro dan antarnegara pada tingkatan makro.

Ketiga, posisi yang kira-kira berada di antara kedua kutub di atas adalah para pendukung ES dan sarjana HI yang berargumen ES mempunyai potensi untuk menjadi alternatif teori menarik karena dinamika politik global abad ke-21 mengindikasikan urgensi dialog antar pendekatan teori dan metode penelitian, bukan 'perang paradigma' tanpa akhir. Pandangan ini diikuti oleh kecenderungan menggabungkan elemen-elemen perspektif realisme dan konstruktivisme, dua perspektif utama yang kontras, menjadi satu pendekatan solidaris/globalis baru (Reus-Smit, 2002). Selain itu, popularitas agenda kosmopolitanisme yang sejalan dengan gagasan normatif ES menunjukkan tingkat penerimaan empiris yang semakin tinggi terhadap konseptualisasi sistemik alternatif. Generasi pengkaji dan praktisi HI yang percaya dengan keefektifan ES, seperti disampaikan Brown (2001), mengklaim sudah tidak ada lagi perspektif murni. Corak teori HI masa kini dan mendatang adalah dialogis, simbiotis mutualistik, dan praktis.

Meskipun tidak tertulis, para pendukung ES menyepakati tiga komponen pokok paradigmatis yang menuntun studi dan riset mereka. *Pertama*, yang paling mendasar adalah konsep masyarakat internasional di mana orde

diciptakan melalui aktivitas kolektif, dan bukan akibat perilaku aktor yang merefleksikan sifat alamiah dan naluriah manusia. *Kedua*, ES menolak saintisme dan mengedepankan tujuan normatif tindakan politik. Arah program riset ES tidak untuk menjawab pertanyaan ontologis *what is*, melainkan mencari jalan keluar yang diformulasi ke dalam bentuk *what it ought to be*. Oleh sebab itu, ES memasukkan unsur etika dalam analisis teori HI, suatu tradisi yang sudah ditinggalkan sejak positivisme mendominasi HI. *Ketiga*, ES berkonsentrasi pada analisis yang bersifat interpretatif melalui eksplorasi sejarah, hukum, dan diplomasi antarbangsa. Secara metodologis, ES merevitalisasi tradisionalisme HI ala Carr.

ASUMSI TEORITIS ES

Perspektif teori ES dapat dipahami melalui konsep-konsep yang berkaitan dengan hakikat politik internasional sebagai interaksi antaraktor terutama negara berdaulat. Secara ringkas asumsi dasar ES dapat dirinci sebagai berikut. *Pertama*, negara adalah aktor sentral dalam politik internasional. *Kedua*, interaksi antarnegara berlangsung dalam lingkungan anarki. *Ketiga*, tujuan politik internasional untuk menjaga tatanan yang tertib dan stabil (*order*). *Keempat*, perilaku aktor negara diatur oleh kesepakatan bersama. *Kelima*, anarki bisa dikelola melalui institusi. *Keenam*, politik internasional tidak bersifat konstan, selalu ada peluang untuk perubahan menuju tatanan baru. Asumsi-asumsi di atas dijabarkan ke dalam tiga subtopik teoritisasi, yakni masyarakat internasional, anarki dan orde yang saling berkaitan.

Masyarakat Internasional sebagai Via Media

Pertanyaan mendasar yang mengawali investigasi tentang masyarakat internasional adalah mengapa di tengah sistem internasional anarki eksis tatanan interaksi antarbangsa yang relatif stabil dan tertib untuk jangka waktu lama? Padahal tidak ada *leviathan* yang mengatur tindakan para aktor sebagaimana terjadi dalam politik domestik. Berangkat dari keyakinan mengenai keberadaan orde dalam anarki, ES menyatakan anarki memang bersifat alamiah dan tidak

dapat dieliminasi, namun realitas faktual mendemonstrasikan karakter sistemik yang tidak selalu konflikatif seperti digambarkan realisme Hobbesian, dan tidak ada perdamaian abadi seperti diharapkan idealisme Wilsonian. Robert Jackson (2001:271) memberikan pandangan mengenai substansi politik internasional menurut ES ialah;

“...a variety of theoretical inquiries which conceive of international relations as a world not merely of power or prudence or wealth or capability or domination but also one of recognition, association, membership, equality, equity, legitimate interests, rights, reciprocity, customs and conventions, agreements and disagreements, disputes, offenses, injuries, damages, reparations, and the rest: the normative vocabulary of human conduct.”

Jackson menyebut interaksi antarnegara sangat kompleks menyerupai relasi sosial manusia, mencakup aspek kompetitif maupun kooperatif. Sehingga, fenomena politik internasional tidak perlu digeneralisasi secara berlebihan. Ada faktor-faktor seperti nilai, norma, aturan, dan kesepakatan yang dapat menjamin keberlangsungan orde. Sejalan dengan pandangan Jackson, Griffiths, Roach, dan Solomon (2009:211) mengemukakan anarki ternyata dapat diatur oleh hukum dan moralitas. ES optimis kalau ketertiban bisa diwujudkan melalui mekanisme kerja sama.

Sepintas lalu argumentasi ES tentang hakikat politik internasional terkesan idealis. Namun jika ditelaah lebih mendalam, cara pandang ES melampaui oposisi biner realisme dan liberalisme. ES mengajukan konsepsi masyarakat internasional sebagai pengganti sistem internasional. Bellamy (2004:9) menyebut *international society of states* merupakan konsep yang lebih bernuansa daripada *international system of states*. Masyarakat internasional memberikan pemahaman tentang keseluruhan kategori interaksi antarnegara, sementara sistem internasional secara eksklusif merujuk kepada anarki. Pendekatan ini disebut *via media* yang berarti menjembatani dan menutupi kekurangan realisme dan liberalisme. Untuk membentuk *via media* rasionalitas menjadi salah satu pedoman terpenting dalam politik luar negeri, yang sama sekali tidak berkenaan dengan loyalitas ideologi (Buzan, 2001:474).

Bagaimana ES menjelaskan masyarakat internasional berada di atas anarki realis dan keluar dari utopianisme harmoni liberalis? Wight (dalam Thomas, 2001:910-912) menyampaikan bahwa kepentingan nasional yang menjadi alasan fundamental kebijakan eksternal tidaklah mutlak dan tanpa kompromi. Aktor-aktor rasional mampu membuat beraneka macam kompromi untuk mencegah konflik. Di sisi lain, konsensus yang dihasilkan melalui proses komunikasi dan negosiasi belum tentu efektif untuk jangka panjang, sehingga selalu ada kemungkinan perubahan mode hubungan timbal balik yang mendorong pergeseran pola kebijakan.

Dengan pijakan rasionalitas dan pemahaman keterbatasan pendekatan realis dan liberalis, ES memosisikan anarki secara berbeda dengan realisme dan liberalisme. Menurut realisme, anarki merupakan hasil dari kehendak negara yang otonom, apapun yang dilakukan negara terhadap lingkungan eksternal dikontrol oleh pemerintah nasional berdaulat. Karena itu, anarki terjadi akibat egosentrisme negara. Hal ini pulalah yang menyebabkan anarki tidak akan bisa dimitigasi. Berlawanan dengan realis, liberalis percaya bahwa anarki dapat diminimalkan sebab ada tingkat solidaritas tinggi di antara negara-negara dalam sistem internasional. Perbedaan karakteristik anarki juga tampak dalam fokus terkait isi kebijakan luar negeri. Realis mengutamakan tanggung jawab nasional, sedangkan liberalis memprioritaskan kewajiban humanitarian. Para penerjemah ES mengungkapkan keberadaan orde yang bergerak dinamis sebagai aplikasi dari kesepakatan bersama (*common agreements*). Landasan operatif dari tatanan masyarakat internasional adalah anggota secara sadar mengikatkan diri kepada tanggung jawab internasional, yakni wajib untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masing-masing (Jackson, 2001:55-58). Masyarakat internasional mengacu kepada tujuan bersama.

Menegaskan perbedaan antara masyarakat internasional dengan sistem internasional, Bull (dalam Alderson dan Hurrell, 2000:98) menyebutkan:

"...the existence of an international society and of laws which are binding on its member states in their relations with another [is] opposed to the tradition of Realpolitik, according to which there is no international society but rather an international state of nature in which states are without binding obligations

in their relations with one another. And [it is] hostile to the doctrine according to which the standards to which it appeal may be made in international politics enjoin not the preservation of international society, but its subversion and replacement with an empire or cosmopolitan society."

Pernyataan mengenai perbedaan tajam antara anarki menurut realisme dan liberalisme dengan ES juga disampaikan oleh Wight (1978:105):

"There are those who hold that international society is so lacking in the requirements of what we normally understand by society that it is not a society at all. They declare that the condition of international relations, because of the prevalence of war and conflict, is best described as 'international anarchy'. If anarchy is understood to mean the absence of common government, then this is precisely the feature of international politics differ from domestic politics. But if anarchy means complete disorder, it is not the true description of international relations. There is cooperation as well as conflict..."

Bagi Wight, dalam masyarakat internasional terdapat fitur sistem internasional, tetapi tidak berlaku sebaliknya. Sistem internasional disebut anarki hanya karena selalu ada perang dan konflik. Padahal menurut Wight, karakteristik sistem internasional tidak sepenuhnya konflikatif, ada dimensi kooperatif. Karena itu, untuk mewedahi pemahaman yang lebih menyeluruh, konsep yang dipergunakan adalah masyarakat internasional.

Realis dan liberalis sama-sama mengatakan bahwa keanggotaan dalam sistem internasional berasal dari faktor-faktor fisik dan alamiah. Perihal hakikat keanggotaan negara dalam masyarakat internasional, Manning (1975:103) berpendapat bahwa kondisi yang melatarbelakangi tidak bersifat fisik, melainkan sosiologis, dan oleh sebab itu, implikasi politik yang ditimbulkan melalui interaksi sosial antarnegara dalam masyarakat internasional hanya dapat diketahui dengan cara menganalisis asal usul kesepakatan yang melandasi pembentukan suatu komunitas.

Pemikiran Bull, Wight, dan Manning sebagaimana dikutip di atas mengindikasikan dua dimensi unik interaksi negara (anggota masyarakat internasional) dan sistem (masyarakat internasional) itu sendiri. *Pertanya*, anarki dikelola, bukan secara alamiah hadir akibat kompetisi kepentingan nasional

antarnegara, demi mewujudkan tatanan interaksi di mana aturan main (*rules of the game*) disepakati secara kolektif. Dan yang *kedua* adalah negara tidak berdaulat penuh dalam anarki, tetapi menjadi subjek yang memberikan bagian kedaulatan kepada hukum internasional agar orde bisa berjalan efektif. Dibandingkan dengan realisme dan liberalisme yang cenderung alergi terhadap konsepsi satu sama lain tentang anarki, ES membahasakan pendirian konseptual mereka tentang anarki dengan gaya yang lebih akomodatif, sembari membedakan diri dengan kedua kutub, yakni *it is more or less order in anarchy* (Buzan, 1993:327).

Selain konsep anarki, ES pun mengusulkan konsep tentang aturan yang berbeda dengan realisme dan liberalisme. Realis menganggap aturan dalam sistem internasional tidak berfungsi efektif, sebab arah interaksi ditentukan oleh kapabilitas nasional. Liberalis percaya bahwa aturan universal relevan untuk menciptakan tatanan global yang damai dan stabil karena semua negara akan merasa lebih aman bila mematuhi hukum internasional. Berdasarkan kepada asumsi inilah liberalisme merekomendasikan pembentukan pemerintahan dunia (*world governance*). Di dalam masyarakat internasional menurut ES, posisi aturan sangat penting sebagai penjamin keberlangsungan komunitas. Tetapi ES memberikan batasan hanya aturan yang dibangun atas dasar persetujuan seluruh anggota masyarakat internasional yang terlibat dalam proses dialog di mana mereka saling mengakui kepentingan bersama. Para anggota komunitas sepakat untuk menegakkan aturan yang mengatur interaksi mereka. Sehingga, tidak ada aturan berlaku secara absolut dalam masyarakat internasional. Fleksibilitas kaidah berinteraksi dimungkinkan oleh karena anggota masing-masing bekerja sama dalam proses dialogis (Bull dan Watson, 1985:1). Dengan kata lain, ES mengutamakan baik proses maupun produk dari interaksi yang terjadi dalam masyarakat internasional.

Aturan tidak sama dengan perintah (*commands*). Perintah mengisyaratkan suatu relasi organisasional hirarkis. Dalam sistem internasional realis tidak mengenal eksistensi hierarki, sebab anarki berarti semua negara mempunyai status yang sama sebagai aktor tertinggi (*no actors above states*). Sebaliknya, perintah menjadi elemen penting dari hierarki struktur politik domestik negara yang dibimbing oleh suatu otoritas pusat (*central authority*). Di tengah sistem anarki

satu negara berbeda dengan lain karena faktor-faktor seperti misalkan populasi, geografi, ekonomi, dan militer sebagai unsur-unsur pokok kekuatan nasional. Pada situasi anarki, negara tidak mempunyai kewajiban moral individual maupun kolektif untuk mematuhi aturan internasional (Hart, 1994:18–20).

Bertolak belakang dengan realisme, ES merujuk pada aturan sebagai instrumen moral esensial interaksi dalam anarki. Konsepsi ES tentang aturan menggambarkan negara-negara yang berada dalam masyarakat internasional sudah menyepakati terlebih dahulu aturan yang bersifat resiprokal, sehingga secara formal kedudukan semua negara setara terlepas dari ukuran kekuatan nasional masing-masing (Philpott, 1997:12). Prinsip kesetaraan formal mencerminkan kekhasan ES yang menerima secara eksplisit dan tanpa batas gagasan kesetaraan menyangkut tugas dan kewajiban internasional negara.

Eksistensi kesetaraan yang bersifat ideasional juga menjadi ciri pokok masyarakat internasional sebagai alternatif sistem internasional. James (1993:270) berpendapat:

"A society is subject to and expressive of the wishes and whims of those who make it up. It reflects actions and reactions of its commitments, or members. And those members will be influenced by their calculations, hopes, purposes, beliefs, anxieties, fears, and all the other elements of the human conditions. This is why the term society, with its voluntaristic connotations, is so much more apt than system to sum up the collectivity of states."

Merujuk pernyataan James, ES menunjukkan bahwa perilaku negara bukan tidak terbatas seperti pandangan realis, melainkan berbagai limitasi normatif, rasional, dan sosial turut mempersempit ruang gerak negara. Jadi jelaslah bahwa masyarakat internasional memiliki peluang ketertiban lebih tinggi dibandingkan sistem internasional.

Anarki: Pluralistik bukan Monolitik

Anarki adalah konsep fundamental dalam studi HI. Sejak HI menjadi disiplin mandiri, diskusi mengenai anarki senantiasa hadir dalam berbagai jenis teorisasi tentang politik internasional. Secara umum anarki sering disalahpahami sebagai

kondisi tanpa pemerintahan atau keadaan tanpa hukum atau ketidakteraturan. Kenneth Waltz (1979:114) bahkan mendefinisikan anarki adalah situasi yang bukan hanya tanpa pemerintahan, melainkan penuh konflik dan kekacauan. Berkat dominasi realisme dalam teori HI, definisi anarki seperti diberikan Waltz menjadi sangat populer, dan cenderung dianggap benar. Aksioma anarki Waltzian inilah yang menurut penteleri ES harus direspons dengan cara berpikir yang lebih bernuansa. Misalkan, ES mengklaim kondisi tanpa pemerintahan pada level internasional belum tentu menciptakan ketidaktertiban ataupun kekacauan total. Wight (1984:5) berargumen perang dan konflik hanyalah konsekuensi natural dari lingkungan yang anarki, di mana anarki sendiri tidak berkaitan langsung dengan ketiadaan pemerintahan. Hubungan antarpemerintah diatur oleh otoritas yang dibuat dalam komunitas mereka, atau masyarakat internasional mereka. Jadi Wight ingin menegaskan anarki adalah bagian dari masyarakat internasional yang dapat berimplikasi pada kejadian seperti perang dan konflik antarnegara.

Secara epistemologis, Robert Jervis (1986:78) mengoreksi preferensi studi HI realis yang bertumpu dari pertanyaan “mengapa perang selalu terjadi” menjadi pertanyaan “mengapa perang lebih sering tidak terjadi” dalam sistem internasional, setidaknya perang hanya terjadi oleh karena faktor insidental.

Mengonfirmasi pandangan ES dan kritik terhadap realisme, Bull (2002:3) mengatakan:

“...while apprehension regarding security is endemic, it varies very considerably in degree. By no means are all states all the time subject to grave worries about the possibility of their partial or complete annexation, and the involuntary liquidation of an established state is now rare, sometimes states may find that life is nasty and brutish, but not always, and only infrequently is it short.”

Perang dan situasi tidak teratur muncul kadang kala saja, dan tidak berlangsung lama. Bull (2002:64) kemudian membedakan efek perang dalam konteks individu manusia dengan negara. Negara sebetulnya tidak serawan yang dipikirkan oleh realis. Serangan terhadap individu bisa mematikan secara langsung. Sedangkan agresi terhadap suatu negara bisa menghancurkan bagian fisik negara, tetapi tidak akan menghilangkan seluruh kemampuan sosial warga negara untuk pulih dari dampak perang. Selain itu, konflik rentan terjadi

pada interaksi antarindividu manusia yang sangat otonom, sementara otonomi negara lebih terbatas, sehingga negara tidak begitu mudah untuk berperang. Dilandasi oleh pemikiran Bull dan Wight ES mengasumsikan analogi politik domestik sebagai pijakan konseptual anarki adalah tidak valid, meskipun tidak ada pemerintah pusat, masyarakat internasional tidak akan serta merta menjadi kacau.

Bull (2002:67) menambahkan praktek yang lazim berlaku dalam hubungan internasional adalah perilaku negara yang tidak dapat dikontrol oleh pemerintahan global, norma interaksi antarnegara, serta institusi seperti hukum internasional dan diplomasi. Oleh sebab itu, kebutuhan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat internasional berasal dari imperatif alamiah maupun sosial. Bila dalam politik domestik, warga negara patuh kepada negara karena membutuhkan perlindungan negara dari ancaman individu lain, maka berkebalikan dengan itu pada masyarakat internasional tidak ada kepatuhan kepada pemerintahan apapun yang membuat negara-negara mendukung ketertiban, tetapi hanya karena kebutuhan untuk memperoleh keamanan sebagai tujuan bersama.

Realis mempertanyakan bagaimana bisa negara-negara yang berbeda secara potensial bersedia tunduk kepada tujuan bersama. Sesuatu yang tidak empiris. Menurut Jones (1981), apalagi kalau yang berinteraksi negara besar dan kuat dengan negara kecil yang lebih lemah, hasilnya adalah dominasi kepentingan negara besar dan kuat, subsistem lain dijadikan sebagai subjek pelaksana saja. Dengan melihat kelemahan asumsional ini, Jones kembali menyerukan *the closure of the English School*. ES menyanggah dengan mengelaborasi dua prekondisi praktis yang membuka jalan agar perbedaan struktural dapat disingkirkan supaya proses pembentukan masyarakat internasional dikedepankan (Sharp, 2003:855–856). *Pertama*, menghadapi kondisi anarki yang dianggap membahayakan, negara-negara cenderung bersikap pragmatis, sehingga pencapaian ketertiban akan didahulukan. Meskipun, pada fase interaksi lebih lanjut mereka mungkin terlibat dalam kontradiksi atau bahkan sengketa tentang substansi tujuan bersama. Contoh, sesudah pendirian komunitas berhasil, barulah agenda organisasional yang berkaitan dengan ekspektasi sosial, resiprositas tanggung jawab, hingga norma intervensi dibahas secara lebih intensif. *Kedua*, keberagaman struktur domestik diatasi melalui budaya diplomasi. Kegiatan diplomasi antarnegara

berlangsung dalam sebuah suasana kultural yang diadaptasikan sejalan dengan komunikasi. Di sinilah sebenarnya ES menunjukkan kepada realisme dan juga liberalisme bahwa aspek humanis budaya manusia secara khusus merupakan faktor katalis intrinsik kolaborasi politik dan keamanan internasional.

Merespons kritik terhadap fisibilitas proses interaksi menuju institusionalisasi komunitas, Bull (2002:111–112) menyampaikan:

“Another major weakness of the indictment that rules depend on the power interests or values of one group of states is that the most central rules of international discourse do not depend on their validity on the special interests on one side but on reciprocal interests. The rules that treaties should be observed, that sovereignty should be respected, that states should not interfere in one another’s internal agreed frontiers, of immunity or inviolability of diplomats – to name only a few – can no sense be viewed simply as instrumentals of the special interests of a particular group. This is, indeed, why less powerful countries have sought actually to become part of the international order, even when sometimes purporting to denounce it.”

Argumen Bull bisa diartikan bahwa anarki bukan fakta penghalang bagi pengembangan aturan interaksi antarnegara, bahkan aturan diterima sebagai pedoman kebijakan yang lebih penting daripada kondisi anarkis.

Buzan memberikan sumbangan pemikiran yang signifikan untuk menjelaskan bagaimana ketertiban internasional dapat terwujud dalam anarki, yaitu dengan berargumen anarki bermanifestasi ke dalam beberapa tingkatan. Anarki harus dilihat seperti realitas yang eksis mengikuti sebuah kontinum, dan bukan sebagai realitas monolitik. Tingkatan anarki bergerak dari keadaan yang belum mapan hingga yang sudah mapan. Inilah yang kemudian menentukan keberadaan tatanan di tengah anarki (Buzan, 2008:175). Skema anarki oleh Buzan menggambarkan anarki sesuai konsepsi realis ialah anarki yang belum mapan karena ditandai oleh fenomena setiap negara berdaulat tidak mengakui negara berdaulat lain mempunyai legitimasi sama dalam sistem internasional. Konsekuensi ketidakmapanan anarki adalah konflik dan kekacauan. Ketidakamanan akan menjadi ancaman terus menerus bagi semua negara, sebab tidak ada usaha untuk menemukan format interaksi yang menjamin bahwa intervensi tidak akan terjadi.

Negara yang lebih kuat bisa kapan saja menyerang negara lebih lemah karena yang kuat tidak menghargai legitimasi yang lemah untuk hidup di dalam sistem internasional. Dalam lingkungan anarkis demikian, konstitusi yang berlaku adalah hukum rimba, *survival of the fittest*.

Deskripsi tentang anarki yang belum mapan sebenarnya tidak tampak dalam kenyataan politik internasional saat ini. ES sendiri memotret kondisi yang memungkinkan orde terbentuk dalam masyarakat anarkis merupakan tahapan lebih lanjut dari evolusi anarki. Jadi relasi kedua jenis anarki bersifat kontinu. Situasi politik internasional kontemporer sesuai pandangan Buzan (2008:176) menyerupai anarki yang sudah mapan. Bagi Buzan (2008:177) “... the benefits of fragmentation could be enjoyed without the costs of continuous armed struggle and instability”. Kemapanan anarki dihasilkan oleh negara-negara yang sudah mengapresiasi legitimasi masing-masing sebagai pemilik kedaulatan, berarti telah muncul kesetaraan formal yang tidak lagi bersandarkan pada unsur kuantitatif kekuatan material. Sehingga, negara yang lebih kecil dan lemah sekalipun bisa berinteraksi dengan negara besar yang lebih kuat dalam kerangka kerja sama berlandaskan aturan bersama. Untuk itu, proses perubahan level anarki membutuhkan, sekaligus mencerminkan, resiprositas berkelanjutan.

Sentralitas Orde dalam Masyarakat Internasional

ES mengklaim hubungan antarnegara cenderung lebih bersifat asosiatif daripada permusuhan. Hubungan internasional merupakan masyarakat antarnegara yang anarkis (*anarchical society of states*). Tentang hal ini Bull (2002:51) menyatakan:

“The international society of states exists when a group of states, conscious of certain common interests and common values, form a society in the sense that they conceive themselves to be bound by a common set of rules in their relations with one another, and share in the working of common institutions... and this is because they regard themselves as bound by certain rules in their dealings with one another, such as they should respect one another’s claims to independence, that they should honour agreements into which they enter, and that they should be subject to certain limitations in exercising force against one another.”

Jadi ada tiga unsur pokok masyarakat internasional: kesadaran tentang kebersamaan, aturan yang mengikat, serta batasan dalam bertindak, khususnya bila menyangkut penggunaan kekuatan militer. Memang negara-negara begitu berbeda satu sama lain, tetapi pertimbangan instrumental memaksa mereka untuk mau mengatur tindakan serta menaati prinsip-prinsip dasar sebagaimana disebut Bull. Pada tahap ini, bisalah disimpulkan anarki ternyata bukan penghambat negara-negara untuk bekerja sama, namun anarki berperan sebagai faktor lingkungan yang mendorong negara-negara bersedia menerima restriksi atas kebebasan bertindak di dalam masyarakat internasional.

Perlu diperhatikan meskipun konsep masyarakat internasional menurut ES mempromosikan semacam keteraturan, tidak berarti keseluruhan realitas yang ditampilkan berasosiasi dengan hal-hal yang positif, seperti deskripsi sistem bergaya liberalisme. Masyarakat internasional adalah sebuah cara untuk mengorganisir kehidupan sosial di level global, bukan sebuah nilai ataupun ekspektasi normatif. Evan Luard (1976:14) membedakan idealisme liberalis dengan masyarakat internasional. Idealisme liberalis merujuk kepada nilai yang sepenuhnya baik tentang sistem internasional. Sedangkan konsep masyarakat internasional menerangkan bahwa di dalam masyarakat yang sangat teratur pun tetap ada konflik yang sering terjadi. Masyarakat internasional menyediakan mekanisme sosial seperti proses resolusi konflik yang juga tidak semestinya diartikan konflik akan benar-benar hilang. Satu lagi yang penting dicatat adalah idealisme liberalis meyakini norma saling pengertian di antara warga dunia hadir secara spontan. ES memandang norma saling pengertian merupakan resultan dari interaksi yang berlangsung terus menerus.

Demikian pula terhadap realisme, gagasan ES tentang masyarakat internasional tidak dimaksudkan sebagai konsepsi moral superior. Masyarakat internasional hanya suatu model pengaturan relasi sosial antarnegara alternatif dari anarki menurut realis. Andrew Hurrell (2006:192) mengklarifikasi posisi masyarakat internasional dimaksud sebagai berikut.

"The essential framework through which conflicts of powers and values have to be mediated, through which shared understandings and vocabularies of justice might be nurtured, and which the discussion of moral ideas and projects might

be able to achieve some deliberative purchase – and perhaps even persuasion, and its focus is on promoting the conditions of procedural justice that just might help to facilitate this enormously difficult task in morally acceptable ways."

Sehaluan dengan Hurrell, Chris Brown (2004:63–64) menekankan bahwa masyarakat internasional adalah perhimpunan negara-negara yang mana relasi mereka diatur oleh norma-norma tertentu. Saling pengertian yang menjadi landasan komunitas bersumber dari komunikasi mengenai kepentingan bersama para anggota, dan tidak ada kaitan kuat dengan kondisi natural asal setiap negara. Oleh sebab itu, masyarakat internasional diarahkan untuk memperkokoh kebersamaan melalui proses dialog secara gradual.

Karena masyarakat internasional dikonstruksi secara sadar lewat keputusan politik antarnegara, maka inheren dalam konsep tentang tujuan interaksi adalah realitas disebut orde, yang mana konsep idealis seperti keadilan (*justice*) bukan tujuan utama. Peter Lyon (1973:24) mengungkapkan orde adalah ciptaan manusia, dan karena itulah beroperasi sesuai kehendak kelompok yang membentuk.

"International order has been, and is, in an important sense a man-created order. It is a continuous culmination, a perennial adaptation. International order is not only one set of arrangements, nor should it be regarded as one moment in time. International order is not inevitable nor self-sustaining. The contemporary international order is but the present, and always changing, aspect of a tradition which can be preserved, adapted, transformed, or dissipated."

Definisi Lyon di atas menunjukkan sifat dinamis dari orde dalam masyarakat internasional. Berbeda dengan anarki menurut realis yang terjadi secara alamiah dan bersifat konstan, orde terjadi akibat proses interaksi antarnegara yang sadar untuk mengatur diri di bawah suatu tatanan bersama. Untuk kepentingan bersama, elemen-elemen orde senantiasa diperbarui.

Oleh karena keberadaan orde, masyarakat internasional tidak semestinya dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial egaliter. Demi menciptakan ketertiban, aturan, dan aktivitas yang mengarah kepada keteraturan, mitigasi konflik, danantisipasi kerap diperkenalkan kemudian diberlakukan secara konsisten. Sehingga

fundamen prinsipil orde adalah utilitarianisme dan fungsionalisme. Mengenal hal ini Watson (1987:151) menulis:

“...a strong case can be made out, on the past systems as well as the present that the regulatory rules and institutions of a system usually, and perhaps inexorably, develop to the point where the members become conscious of common values and the system becomes an international society.”

Jadi Lyon dan Watson berargumen bahwa tujuan interaksi masyarakat internasional adalah menyediakan kondisi kondusif bagi pencapaian sebuah orde, tidak seperti realisme dan liberalisme yang mementingkan pelestarian standar tradisi moral dan normatif tertentu. Menurut ES kepentingan dan nilai bersama menjadi motivasi negara-negara anggota masyarakat internasional untuk berkompromi dan mengakomodasi satu sama lain, serta untuk menaati institusi seperti hukum internasional dan diplomasi. Dengan kata lain, sentralitas orde, dan bukan kekuatan nasional ataupun pemerintahan dunia, yang menjamin sekaligus mendorong interaksi guna membuat stabilitas masyarakat internasional.

Aplikasi ES untuk Riset HI

Seperti realisme, liberalisme, Marxisme, dan berbagai perspektif teori HI klasik, ES bukanlah sebuah teori formal dan operasional, melainkan serangkaian asumsi pokok tentang objek, subjek, dan metode observasi dalam studi HI. Berdasarkan deskripsi, eksplanasi, serta prediksi umum yang diberikan ES, berbagai konsep, teori, dan analisis bisa dibuat. Untuk keperluan pengantar, implementasi pemikiran ES ke dalam riset HI dapat disederhanakan menjadi tiga area, meskipun pada praktek nyata ada lebih banyak lagi, yakni kebijakan luar negeri (*foreign policy*), regionalisme, dan kajian keamanan internasional. Kategorisasi ini diajukan berdasarkan fokus studi ataupun riset yang dikerjakan, dan tidak harus mewakili fragmentasi tematik yang ketat. Artinya, persinggungan antararea bahasan sangat mungkin terjadi. Dari berbagai literatur yang sudah diperiksa, bisa disampaikan bahwa kerap kali ketiga topik bertemu secara empiris.

Aplikasi ES untuk mempelajari perilaku kebijakan luar negeri memperlihatkan kecenderungan metodologis sebagai berikut. *Pertama*, berbeda dengan realisme dan liberalisme yang menggunakan peringkat analisis (*level of analysis*) sebagai alat bantu, dengan kata lain mengikuti tata cara behavioralisme, ES memakai pendekatan historis dan holistik. *Kedua*, ES memandang kebijakan luar negeri suatu negara adalah hasil dari proses evolusi gradual dan berkelanjutan berbagai faktor domestik maupun internasional yang saling berkaitan. *Ketiga*, aspek nonmaterial, seperti nilai budaya, norma sosial, dan praktek institusional mempunyai peran penting dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri. *Keempat*, tujuan tindakan internasional adalah membuat dan memelihara orde. *Kelima*, oleh sebab itu, arena interaksi dalam masyarakat internasional, anarki, selalu mengalami perubahan karakter sesuai kehendak negara-negara anggota.

Peringkat analisis merupakan ciri khas metode studi politik internasional positivis yang dikembangkan antara lain oleh J. David Singer (1961), James N. Rosenau (1961), dan K. J. Holsti (1995). Asumsi dasar behavioralis sangat kuat melandasi kerangka analisis Singer, Rosenau, dan Holsti, yakni kebijakan luar negeri adalah serangkaian keputusan politik yang dibuat dan dikerjakan oleh aktor-aktor yang menyesuaikan perilaku mereka terhadap pengaruh lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, tugas analisis dan pengkaji kebijakan luar negeri adalah memetakan relasi antara aktor dan faktor yang membentuk suatu tindakan. Hasil yang dicapai kemudian digeneralisasi menjadi pola-pola umum kebijakan luar negeri yang dapat disistematisasi menjadi teori universal. Para behavioralis/positivis membagi peringkat analisis menjadi berbagai jenis sesuai kebutuhan observasi mereka, mulai dari tingkatan mikro, yakni individu dan kelompok, hingga tingkatan makro seperti negara, organisasi antarnegara, hingga sistem internasional.

Bagi ES, penggunaan peringkat analisis tidak terlalu membantu untuk memahami karakteristik dan perilaku kebijakan luar negeri. Pemilahan menurut aktor dan faktor dominan cenderung disertai oleh pengabaian unsur-unsur nonfisik atau tidak terindera (*intangible*) yang dalam proses politik justru lebih menentukan muatan dan arah kebijakan seorang pemimpin negara (Hobsbawm, 1995:3; Hill, 2003:9–10). Realis dan liberalis juga dianggap mengabaikan konstruksi historis

yang menjadikan suatu lingkungan internal dan eksternal negara signifikan bagi pembuatan keputusan. Dan yang paling penting menurut ES adalah kekeliruan realis dan liberalis yang meyakini kesahihan relasi fungsional antara kepentingan nasional, terutama kekuasaan (*power*) dan kekayaan (*wealth*), dengan kebijakan negara di arena internasional yang anarkis. Para pendukung ES menyebutkan faktor pendorong seorang aktor melakukan tindakan bersifat intuitif, dan seringkali tidak dapat diuraikan secara kuantitatif seperti kepentingan nasional. Ada dimensi sosial humanis yang harus diperhatikan oleh analis dan pengkaji politik dan kebijakan luar negeri agar dapat memahami proses di balik pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

ES membandingkan tiga alasan di balik tindakan negara, yakni kepentingan/tanggung jawab nasional, kepentingan/tanggung jawab humanitarian transnational, dan kepentingan/tanggung jawab internasional. Yang pertama mengindikasikan karakter egosentris. Implikasi egosentrisme antaraktor adalah sistem menjadi anarkis dan bahkan *chaos*. Yang kedua berorientasi kepada individu manusia sebagai aktor sosial dalam sistem internasional, sehingga aspirasi kosmopolitan lebih ditonjolkan. Hubungan internasional dilukiskan seperti jejaring masyarakat global yang direkatkan oleh solidaritas lintas batas negara. Perang dan konflik dianggap sebagai konsekuensi negatif yang patut dihindari. Bila perang dan konflik pecah, kemudian membahayakan warga sipil, maka masyarakat global bertanggung jawab untuk menolong. Ekspresi politik dari kepentingan humanitarian kosmopolitan ialah tanggung jawab melindungi (*the responsibility to protect*). Sedangkan yang ketiga, menurut ES, merupakan tugas dan sekaligus tujuan negara berdiplomasi dalam arena politik internasional, yakni menciptakan orde sebagai tanggung jawab internasional. Orde tidak selalu berarti perdamaian ideal, karena orde juga mencakup aspek koersif. Keating (2014) mengaplikasikan ES untuk menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Kanada, menemukan bahwa ketiga konsep tentang kepentingan/tanggung jawab berlaku silih berganti. Tidak ada dominasi satu kepentingan yang membentuk kebijakan secara konstan dari masa ke masa.

Pertanyaan yang dijawab oleh peneliti ES adalah mengapa anarki tidak mencegah negara-negara untuk saling bekerja sama. Wicaksana (2016:741–758), membahas evolusi kebijakan luar negeri Indonesia, berargumen ada tiga fenomena

unik yang mendemonstrasikan anomali anarki, sekaligus mematahkan generalisasi realis bahwa dalam anarki tidak dimungkinkan terjadi kerja sama. *Pertama*, realis mengutamakan ukuran fisik sebagai variabel kapasitas diplomasi, misalkan luas wilayah negara, jumlah penduduk, dan sumber daya alam. Negara besar mempunyai kapabilitas diplomasi tinggi sebab ditunjang oleh tiga unsur kekuatan nasional. Ternyata ketiga variabel realis tidak berlaku untuk Indonesia. Walaupun Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk terbanyak keempat serta kandungan sumber daya alam melimpah, variabel nonfisik/nonmaterial lebih berpengaruh terhadap posisi Jakarta di hadapan masyarakat internasional. Sejarah hubungan luar negeri Indonesia membuktikan forum multilateral seperti Konferensi Asia Afrika dan ASEAN justru lebih berkontribusi untuk mendukung pencapaian tujuan nasional Indonesia, bila dikaitkan dengan agenda dekolonisasi, stabilitas kawasan, dan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, Wicaksana, menemukan konsep kepentingan bersama (*common interest*) relevan untuk menjelaskan perilaku kooperatif di tengah anarki.

Kedua, realis misalkan John Mearsheimer (2001) mengeklaim negara adalah aktor rasional yang berinteraksi di dunia anarkis, di mana negara satu dengan yang lain tidak saling mengetahui intensi masing-masing dalam melakukan politik internasional. Intensi yang sebenarnya ada di pikiran pembuat kebijakan—perilaku dan ucapan tidak merepresentasikan intensi riil. Padahal, semua negara mempunyai tujuan sama, yang paling penting adalah kelangsungan hidup (*survival*). Karakteristik relasi antarnegara, kemudian menjadi penuh prasangka dan konflikatif. Karena itu, strategi terbaik untuk bertahan hidup ialah pertahanan diri (*self-help/self-defense*). Mekanisme pertahanan diri yang terbaik adalah dengan menjadi hegemon atau kekuatan dominan di kawasan di mana negara berada. Berdasar pada karakterisasi inilah realis merekomendasikan dua strategi bagi negara-negara kecil dan menengah dalam sistem internasional; merapat ke sisi negara besar agar memperoleh perlindungan (*bandwagoning*) atau membangun aliansi untuk mengimbangi ancaman dari agresor (*balancing*).

Dalam kasus Indonesia, kedua strategi realis tidak diterapkan, tetapi Indonesia tetap bisa eksis dan berdaulat. Alternatif yang diambil justru bersifat akomodatif; Jakarta tidak memilih *bandwagoning* ataupun *balancing*, melainkan

merangkul kekuatan eksternal ke dalam sebuah organisasi multilateral dengan norma dan pelembagaan interaksi mengikuti kesepakatan bersama. Wujud dari institusionalisasi dimaksud terlihat dalam forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) yang mewadahi interaksi antaraktor utama di Asia Pasifik, termasuk Amerika Serikat, China, India, dan Rusia, bahkan Korea Utara dan Pakistan pun diinklusi. Melalui skema diplomasi multilateral ARF, Jakarta bisa mengelola pola hubungan antaranggota yang secara formal setara, meskipun kekuatan nasional anggota bervariasi. Inilah model masyarakat internasional yang menciptakan orde di Kawasan Asia Pasifik.

Ketiga, realis seperti Christopher Layne (1993) percaya bahwa sistem internasional akan selalu mengarah kepada equilibrium kekuatan. Tujuan yang ingin dicapai sekaligus metode pencapaian stabilitas sistemik adalah dengan perimbangan kekuatan antaraktor. Oleh sebab itu, secara alamiah jika ada satu negara yang berupaya untuk mendominasi sistem, maka akan muncul negara atau gabungan negara lain yang berusaha mengimbangi kekuatannya, sehingga equilibrium tidak terganggu. Layne dan Mearcheimer sama-sama meyakini kebangkitan China sebagai adidaya akan selalu direspons oleh Amerika Serikat demi keseimbangan yang menjamin stabilitas sistem internasional. Namun, perkembangan di Asia Pasifik memperlihatkan fenomena relasi yang bersifat majemuk, antara dua adidaya terjadi persaingan, kerja sama, asosiasi, disosiasi, ketegangan, interdependensi, dan negosiasi terus menerus yang membentuk orde. Meskipun orde hirarkis, menurut Evelyn Goh (2008), stabilitas tercipta, dan prediksi realis tentang *chaos* pasca Perang Dingin tidak terbukti.

Ketiga argumen di atas bermuara pada konsep regionalisme keamanan disebut komunitas keamanan (*security community*). Emanuel Adler dan Michael Barnett (1998) mendefinisikan komunitas keamanan sebagai bentuk ideal masyarakat internasional. Komunitas keamanan menegakkan orde melalui cara-cara persuasif hingga koersif sesuai dengan norma dan konsensus antaranggota. Jadi berbeda dengan komunitas keamanan menurut realis yang memungkinkan pengambilan keputusan dan tindakan sepihak dari aktor dominan. ES mengklasifikasikan komunitas keamanan sesuai dengan level otonomi dan pengakuan identitas nasional negara anggota, yakni level pluralis di mana otonomi dan pengakuan identitas sangat tinggi, dan level solidaris di mana otonomi dan pengakuan

identitas individual dikurangi atau dibatasi oleh komunitas. Implementasi model-model komunitas keamanan dapat disaksikan dalam evolusi organisasi seperti Uni Eropa dan ASEAN. Di Asia Tenggara, masyarakat internasional termanifestasi dalam ASEAN yang menerapkan model pluralis (Narine, 2006).

PENUTUP

Untuk tujuan pengantar teori HI, bab ini sudah membahas konsep dan pemikiran kunci ES, yang meliputi masyarakat internasional, anarki, dan orde. Aplikasi ES dalam penelitian dan analisis praktis dikembangkan melalui pembacaan ketiga elemen perspektif, yang menghasilkan penjelasan turunan mengenai kebijakan luar negeri, model regionalisasi hubungan antarnegara, dan komunitas keamanan. Namun perlu dicatat bahwa elaborasi gagasan ES tidak hanya berhenti sampai di sini. Dalam Studi HI terkini wacana teoritis ES telah dikembangkan menjadi aneka konsep dan agenda riset lain. Dan bahkan bermunculan inisiatif eklektikisme antara ES dengan perspektif teori HI positivis menuju apa yang disebut sebagai teori kompleksitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, E., and Michael B. 1998. *Security Communities*. Cambridge University Press.
- Bellamy, AJ. 2004. Introduction. Dalam Alex J. Bellamy (ed.). *International Society and Its Critics*. Oxford University Press.
- Brown, C. 2001. World Society and the English School: An International Society's Perspective on World Society. *European Journal of International Relations*, 7(4): 423–441.
- _____. 2004. The "English School" and World Society. Dalam Mathias Albert dan Lena Hilkerme (eds.). *Nikias Luhman and World Politics*. Routledge.
- Bull, H. 2000. The Grotian Conception of International Society. Dalam Kai Alderson dan Andrew Hurrell (eds.). *Hedley Bull on International Society*. Palgrave MacMillan.
- _____. 2002. *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics*. (Edisi Ketiga). Palgrave Macmillan.

- Bull, H., and Adam Watson. 1985. *The Expansion of International Society*. Oxford University Press.
- Buzan, B. 1993. From International System to International Society: Structural Realism and Regime Theory Meet the English School. *International Organization* 47(3): 327–352.
- _____. 2001. The English School: An Underexploited Resource in IR. *Review of International Studies* 27(3): 471–488.
- _____. 2008. *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era*. (Edisi Ketiga). Harvester Wheatsheaf.
- _____. 2014. *An Introduction to the English School of International Relations: The Societal Approach*. Polity Press.
- Dunne, T. 1998. *Inventing International Society: A History of the English School*. Springer.
- Goh, E. 2008. Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies. *International Security*, 32(3): 113–157.
- Griffiths, M., Roach, SC., dan Solomon, MS. 2009. *Fifty Key Thinkers in International Relations*. Routledge.
- Hall, I. 2001. Still the English Patient? Closures and Inventions in the English School. *International Affairs*, 77(4): 931–942.
- Hart, HL. 1994. *The Concept of Law*. (Edisi Kedua). Clarendon.
- Hill, C. 2003. *The Changing Politics of Foreign Policy*. Palgrave.
- Hobsbawm, EJ. 1995. *The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991*. Pantheon Books.
- Holsti, K.J. 1995. *International Politics: A Framework for Analysis*. (Edisi Ketujuh). Prantice-Hall.
- Hurrell, A. 2006. The State of International Society. Dalam Richard Little dan John Williams (eds.). *Anarchical Society in A Globalized World*. Palgrave MacMillan.
- James, A. 1993. System or Society?. *Review of International Studies*, 19(3): 269–288.
- Jackson, RH, 2001. *The Global Covenant: Human Conduct in a World of States*. Oxford University Press.
- Jervis, R. 1986. From Balance to Concert; A Study of International Security Cooperation. Dalam Kenneth A. Oye (ed.). *Cooperation under Anarchy*. Princeton University Press.
- Jones, RE. 1981. The English School of International Relations: A Case for Closure. *Review of International Studies*, 7(1): 1–13.
- Keating, T. 2014. The Transition in Canadian Foreign Policy through An English School Lens. *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, Doi.0020702014527893.
- Layne, C. 1993. The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Rise. *International Security*, 17(4): 5–51.
- Linklater, A., and Suganami, H. 2006. *The English School of International Relations: A Contemporary Reassessment*. Cambridge University Press.
- Linklater, A. 2013. The English School. Dalam Scott Burchill *et al.*, (eds.). *Theories of International Relations*. Palgrave MacMillan.
- Luard, E. 1976. *Types of International Society*. MacMillan.
- Lyon, P. 1973. New States and International Order. Dalam Alan James (ed.). *The Bases of International Order*. Oxford University Press.
- Mearsheimer, JJ. 2001. *The Tragedy of Great Power Politics*. WW Norton & Company.
- Manning, CA.W. 1975. *The Nature of International Society*. Palgrave MacMillan.
- Narine, S. 2006. The English School and ASEAN. *The Pacific Review*, 19(2): 199–218.
- Philpott, D. 1997. *Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped the Modern World*. Princeton University Press.
- Reus-Smit, C. 2002. Imagining Society: Constructivism and the English School. *The British Journal of Politics & International Relations*, 4(3): 487–509.
- Rosenau, JN. 1961. *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. Free Press.
- Sharp, P. 2003. Herbert Butterfield, the English School and Civilizing Virtues of Diplomacy. *International Affairs*, 79(4): 855–878.
- Singer, J.D. 1961. The Level of Analysis Problem in International Relations. *World Politics*, 14(1): 77–92.

- Thomas, SM. 2001. Faith, History and Martin Wight: The Role of Religion in the Historical Sociology of the English School of International Relations. *International Affairs* 77(4): 905-929.
- Vincent, R.J. 1986. *Human Rights and International Relations*. Cambridge University Press.
- Waever, O. 1996. The Rise and Fall of the Inter-paradigm Debate. Dalam Steve Smith, Ken Booth, and Marysia Zaleski (eds.). *International Theory Positivism and Beyond*. Cambridge University Press.
- Waltz, K. 1979. *Theory of International Politics*. McGraw-Hill.
- Watson, A. 1984. *Diplomacy: The Dialogue between States*. (Edisi Pertama) Methuen & Co.
- _____. 1987. Hedley Bull, State Systems and International Societies. *Review of International Studies*, 13(2); 147-153.
- Wicaksana, IGW. 2016. International Society: The Social Dimensions of Indonesia's Foreign Policy. *The Pacific Review*, 29(5): 741-759.
- Wight, M. 1975. Power Politics. Dalam Hedley Bull dan Carsten Holbraad (eds.) *Power Politics*, Leicester University Press.
- _____, Wight, G., and Porter, B (eds.). 1991. *International Theory: The Three Traditions*. Leicester University Press.

9

Konstruktivisme

I Gede Wahyu Wicaksana

PENGANTAR

Konstruktivisme adalah pendekatan teoritis Hubungan Internasional (HI) yang mulai populer sejak dekade 1990-an setelah Perang Dingin berakhir. Bab ini membahas mengenai asal mula kemunculan perspektif konstruktivisme dalam studi HI kontemporer, karakteristik dasar dan prinsip utama konstruktivisme, cara pandang konstruktivis tentang politik global, dan relevansi konstruktivisme sebagai referensi teoritis maupun metodologis untuk kegiatan analisis serta riset hubungan internasional.

Sebagai penuntun diskusi, perlu disampaikan bahwa yang dimaksud konstruktivisme dalam buku ini adalah perspektif teoritis HI yang berseberangan secara ontologi, epistemologi, dan metodologi dengan rasionalisme ala Amerika (*American rationalism*) termasuk neorealisme dan neoliberalisme (neo-neo) di satu sisi, dan bukan merupakan bagian dari teori kritis¹ (*critical theory*) atau perspektif pospositivisme, seperti feminisme, Teori Kritis Mazhab Frankfurt dan posmodernisme. Agar lebih jelas, maka pembahasan mengenai konstruktivisme

¹ Teori Kritis (dengan awalan huruf besar digunakan untuk merujuk kepada teori-teori sosial dan HI yang diinspirasi oleh Mazhab Frankfurt. Sedangkan teori kritis (tanpa awalan huruf besar) digunakan untuk merujuk teori-teori sosial dan HI posstrukturalis secara umum yang mencakup, Mazhab Frankfurt, posmodernisme, feminisme, dan poskolonialisme.